



Peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital 2025-2045

Peran Teknologi Pemerintah Digital dalam Mewujudkan Transformasi Digital Pemerintah di Indonesia

Meutya Hafid

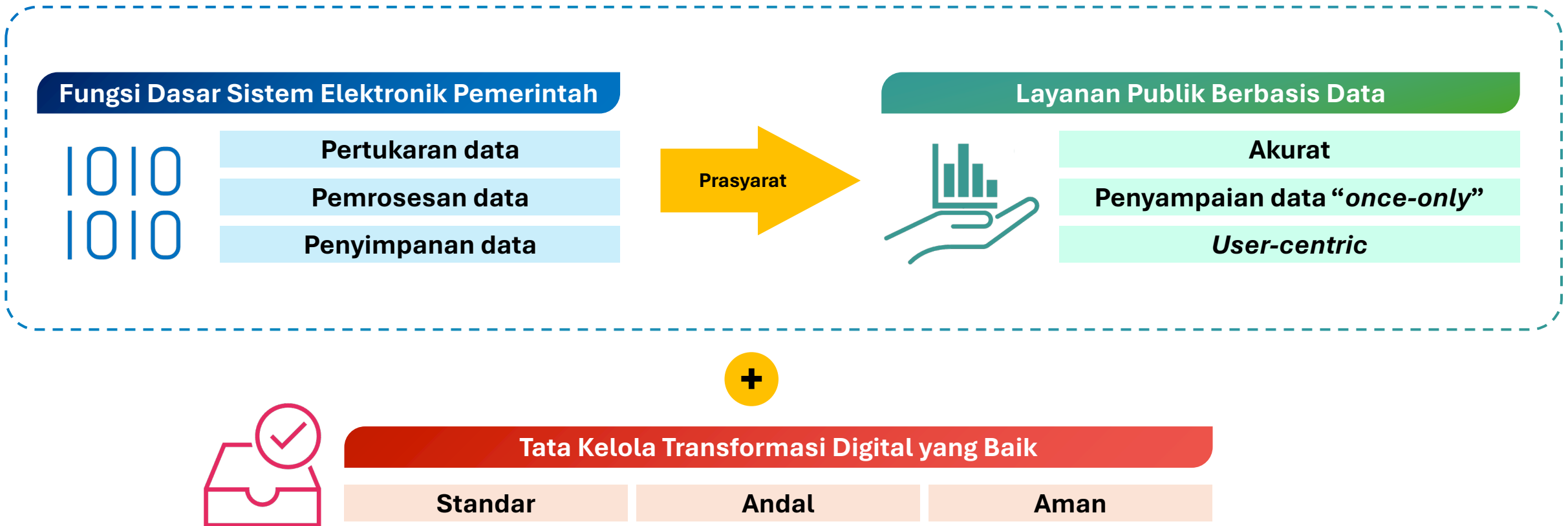
Menteri Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

Kamis, 26 Februari 2026



Peran Strategis Teknologi Pemerintah Digital SEBAGAI *KEY DRIVER* DAN FONDASI PELAYANAN PUBLIK

Pemerintah digital bukan sekadar soal aplikasi dan infrastruktur. Ia menyentuh cara negara bekerja: **bagaimana data dikelola, bagaimana sistem digital saling terhubung, dan bagaimana keputusan serta kebijakan dirumuskan berdasarkan data yang terkini dan akurat.**



Beberapa Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital DALAM Mendukung TRANSFORMASI Digital PEMERINTAH

1 Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik

Mewajibkan instansi publik mendeklarasikan sistem elektroniknya dan memutakhirkan data secara berkala

Menciptakan **visibilitas bagi negara** atas sistem elektronik pemerintah yang beroperasi

2 Klasifikasi Data Berbasis Risiko

Melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan data **berbasis risiko**

Klasifikasi data meliputi data terbuka, terbatas, dan tertutup

3 Pemisahan Lapisan Data dari Aplikasi Layanan Publik

Menghindari terjadinya duplikasi dan ketidakkonsistenan data

Mengamankan **data tidak terkunci dalam sistem tertentu** (*vendor lock-in*)

Memudahkan pemanfaatan AI

4 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Fondasi pertukaran data sebagai *Digital Public Infrastructure* (DPI)

Menciptakan data yang bersifat **single source of truth**

Memungkinkan integrasi layanan antar instansi publik secara terstandar

5 Domain go.id

Representasi resmi pemerintah di ruang digital

Tanda pengenal kanal resmi pemerintah

6 Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara Berkala

Memastikan sistem elektronik instansi publik dapat **memenuhi standar, memiliki pengendalian internal, dan mampu memitigasi gangguan**

Menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan sistem elektronik lingkup publik

7 Rekomendasi Clearance Belanja TIK

Memastikan belanja TIK instansi publik **selaras dengan arsitektur SPBE nasional**

Mencegah duplikasi

Optimalisasi penggunaan anggaran negara

8 Standar Teknis dan Prosedur Aplikasi SPBE

Memastikan **interoperabilitas, standar keamanan, dan integrasi arsitektur** setiap aplikasi pemerintah

9 Pusat Data Nasional Berbasis Ekosistem

Memperkuat **resiliensi sistem**

Alokasi risiko secara proporsional

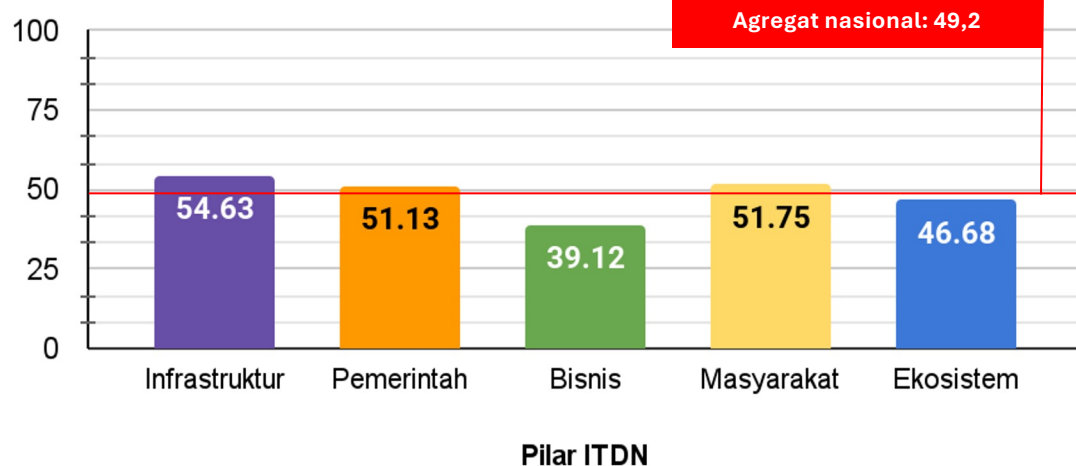
Membuka peluang **kolaborasi pemerintah-pelaku usaha**

Mewujudkan Transformasi Digital Pemerintah Yang Inklusif

TERHUBUNG, TUMBUH, TERJAGA HINGGA KE DAERAH

Capaian Indeks Transformasi Digital Nasional

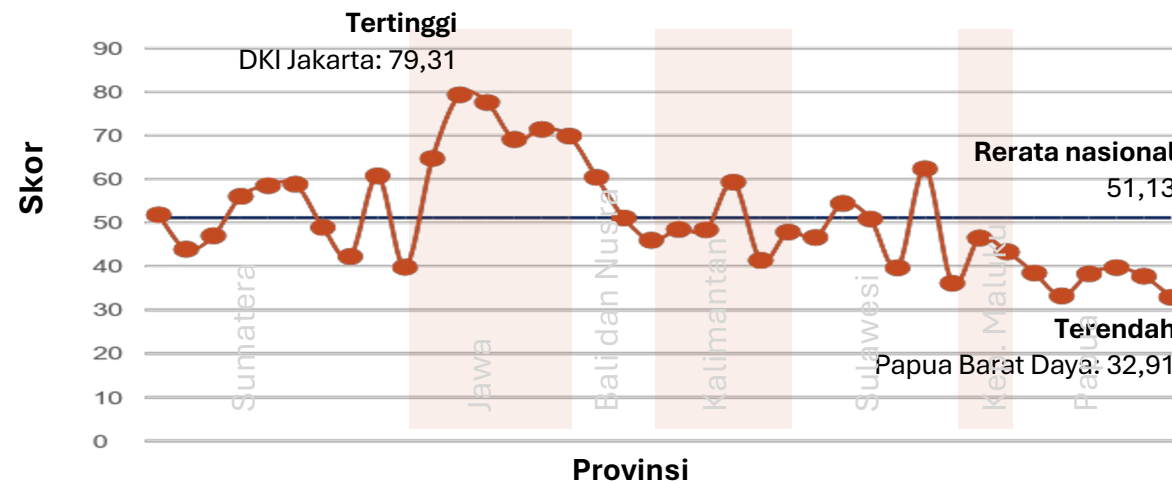
Tahun 2022



Indeks TDN Tahun 2022, diterbitkan tahun 2024

Indeks Transformasi Digital Nasional (2022)

Pilar Pemerintah Digital



Instrumen Pendampingan Kementerian Komdigi untuk Pemerintah Daerah, antara lain:

1

Klinik Pemerintah Digital

Ruang konsultasi teknis dan tata kelola untuk membantu Pemerintah Daerah memperkuat arsitektur sistem dan kesiapan regulasi transformasi digital

2

Pendampingan Smart City

Memastikan transformasi digital daerah tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi berlanjut pada implementasi yang terukur dan berdampak dengan berbagai solusi berbasis kota cerdas



Terima Kasih

**Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia**

Terhubung, Tumbuh, Terjaga

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
www.kominfo.go.id

 @kemkomdigi  @kemkomdigi  @kemkomdigi